

ANALISIS TIPOLOGI KLASSEN DAN KETIMPANGAN WILAYAH

DI PULAU SUMATERA



Oleh :

Shania Taradipa

01021381621184

Ekonomi Pembangunan

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Meraih Gelar Sarjana Ekonomi

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS EKONOMI

2021

**ANALISIS TIPOLOGI KLASSEN DAN KETIMPANGAN WILAYAH DI
PULAU SUMATERA**

Disusun Oleh:

Nama: : Shania Taradipa

Nim : 01021381621184

Fakultas : Ekonomi

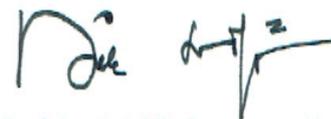
Jurusan : Ekonomo Pembangunan

Kosentrasi : Ekonomi Regional

Disetujui, untuk digunakan dalam ujian komprehensif.

Tanggal Persetujuan

Dosen Pembimbing



Tanggal: 15 Desember 2020

Ketua: Prof. Dr. Didik Susetyo, M. Si
NIP: 1960071011987031003



Tanggal: 20 Januari 2021

Anggota: Dr. Imam Asngari, S.E., M. Si
NIP: 197306072002121002

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI
ANALISIS TIPOLOGI KLASSEN DAN KETIMPANGAN WILAYAH DI PULAU
SUMATERA

Disusun Oleh:

Nama : Shania Taradipa
NIM : 01021381621184
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Ekonomi Pembangunan
Bidang Kajian/Konsentrasi : Ekonomi Regional

Telah diuji dalam ujian komprehensif pada tanggal 22 Februari 2021 dan telah memenuhi syarat untuk diterima.

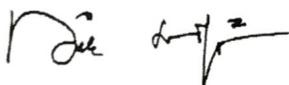
Panitia Ujian Komprehensif

Palembang, 22 Februari 2021

Ketua

Anggota

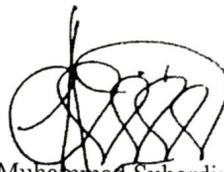
Anggota



Prof. Dr. H. Didik Susetyo, M.Si
NIP: 1960071011987031003



Dr. Imam Asngari, S.E., M.Si
NIP: 197306072002121002



Dr. Muhammad Subardin, S.E., M.Si
NIP: 197306072002121002

Mengetahui
Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan



Dr. Mukhlis, S.E., M.Si
NIP: 197304062010121001

ASLI

JUR. EK. PEMBANGUNAN 29-3-2021
FAKULTAS EKONOMI UNSRI

SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Shania Taradipa
NIM : 0121381621184
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Ekonomi Pembangunan
Mata Kuliah Skripsi : Ekonomi Regional

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul:

Analisis Tipologi Klassen dan Ketimpangan Wilayah di Pulau Sumatera

Pembimbing:

Ketua Prof. Dr. H. Didik Susetyo, M. Si
Anggota Dr. Imam Asngari, S.E., M.Si
Tanggal Ujian 23 Februari 2021

Adalah benar hasil karya saya atau bukan merupakan plagiasi. Apabila dikemudian hari ditemukan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang saya sampaikan bukan karena saya sendiri/plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi dalam bentuk apapun. Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palembang, 23 Februari 2021
Pembuat pernyataan.



Shania Taradipa
NIM: 01021381621184

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Sesungguhnya bersama kesukaran itu ada kemudahan”

“Karena itu bila kau telah selesai (mengerjakan yang lain) dan kepada Allah,
berharaplah “

(Q.S Al Insyirah : 6-8)

“Hai orang-orang beriman, bersabarlah kamu dankuatkanlah kesabaranmu dan
tetaplah bersiap siaga dan bertaqwalah kepada Allah supaya kamu menang “

(QS. Ali-Imran : 200)

“Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka
merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri “

(QS. Ar Ra'd : 11)

“Sesuatu akan terlihat tidak mungkin sampai semuanya selesai “

(Nelson Mandela)

“Kamu tidak bisa kembali dan mengubah masa lalu, maka dari itu tataplah masa depan
dan jangan buat kesalahan yang sama kedua kali, maka barang siapa yang bersungguh-
sungguh maka ia pasti akan sampai ”

(Penulis)

Kupersembahkan Untuk:

- ❖ Kedua Orang Tuaku Papa Citro Alianto dan Mama Purwati Ningsih
- ❖ Keluarga tercinta dan tersayang
- ❖ Dosen Jurusan Ekonomi Pembangunan
- ❖ Temen-temen Seperjuangan
- ❖ Almamater

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala limpahan Karunia dan Rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul Analisis Tipologi Klassen dan Ketimpangan Wilayah di Pulau Sumatera. Skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam meraih derajat Sarjana Ekonomi Program Strata Satu (S-1) Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.

Skripsi ini membahas mengenai Analisis Klasifikasi Tipologi kelas dalam menentukan wilayah yang maju dan tertinggal, dan juga untuk menentukan berapa besar tingkat ketimpangan di Provinsi Pulau Sumatera. Hasil dari penelitian ini adalah analisis Tipologi Klassen sangat berpengaruh dalam menentukan ketimpangan wilayah yang terjadi di Provinsi-provinsi Pulau Sumatera. Hal ini dapat dilihat dengan menggunakan hasil klasifikasi dalam pengelompokan wilayah berdasarkan kuadran dan ketimpangan wilayah dapat dilihat dengan analisis Indeks Williamson.

Penulis berharap agar skripsi ini dapat memberikan kontribusi yang positif bagi ketimpangan wilayah yang terjadi di Pulau Sumatera, agar dikemudian hari tingkat ketimpangan di Pulau Sumatera dapat menurun atau termasuk dalam kategori rendah. Dan untuk penelitian selanjutnya agar dapat menjadi referensi yang baik bagi akademik.

Palembang, 23 Februari 2021

Penulis,



Shania Taradipa

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT karena penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat ada waktunya. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini banyak kurangnya dan tidak dapat berjalan dengan baik dan lancar tanpa bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Untuk itulah pada kesempatan ini, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini, secara khusus penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, terutama kepada:

1. Alhamdulillah Kepada Allah SWT yang telah menggerakkan hati dan pikiran agar dapat membuat dan menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktunya. Dan Alhamdulillah Allah SWT telah melimpahkan rahmat dan karunia dengan cepat dan lancar semata-mata karena Kehendak-Mu Ya Allah.
2. Terima kasih banyak kepada kedua orang tua saya yang tercinta, papa Ir. Citro Alianto dan mama tersayang Purwati Ningsih yang selalu mensupport dari awal kuliah sampe sekarang, tak henti-henti memberikan perhatian, motivasi, kasih sayang, serta selalu memberikan dukungan lewat doa supaya saya bisa lancar dalam menyelesaikan kuliah. Pengorbanan yang kedua orangtua saya berikan tidak akan pernah bisa terbalaskan seumur hidupku.
3. Terima kasih kepada Bapak Prof. Didik Susetyo, M. Si dan Bapak Dr. Imam Asngari, S.E, M. Si selaku Dosen Pembimbing saya yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing saya dari Proposal hingga

Skripsi. Terimakasih kepada kedua Pembimbing saya yang selalu memberikan saran, masukan dan arahan dalam menyelesaikan Skripsi ini.

4. Terima kasih kepada Bapak Dr. Muhammad Subardin, S.E, M. Si selaku Dosen Penguji yang telah memberikan kritik dan saran, serta bantuan agar saya tidak salah akan revisi selanjutnya. Terimakasih kepada bapak Subardin sudah sangat membantu saya dalam dalam kelancaran dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Terima kasih kepada Saudaraku Yessica Citra Puri, Adelia Tiara Sandei, dan Nada Mai Sandy. Karena mereka juga saya sangat termotivasi untuk membuktikan dan berusaha sebaik mungkin agar saya dapat menyelesaikan Skripsi saya dan mendapatkan Gelar Sarjana dan ingin seperti kakak-kakak saya yang sudah bekerja.
6. Tak lupa juga untuk terimakasih kepada teman-teman saya Rima Qotrunnada, Nindya Meiliana Kiranti, dan Chatri Septiani Aisyah yang selalu membantu dan menemani saya disaat saya lg membutuhkan bantuan. Serta sama-sama berjuang mendapatkan gelar Sarjana.

Palembang, 23 Februari 2021

Penulis,



Shania taradipa

ABSTRAK

ANALISIS TIPOLOGI KLASSEN DAN KETIMPANGAN WILAYAH DI PULAU SUMATERA

Oleh:

Shania Taradipa; Didik Susetyo; Imam Asngari

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tipologi klassen dan ketimpangan wilayah di Provinsi-provinsi Pulau Sumatera selama periode 2011-2018. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan analisis deskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian adalah data sekunder. Sumber data yang didapatkan dari BPS di Provinsi-provinsi Pulau Sumatera. Hasil penelitian pada klasifikasi klassen dimana kuadran I ditempati oleh provinsi Jambi, kuadran II dimiliki oleh provinsi Bangka Belitung, kuadran III terdapat di provinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Lampung, Kepulauan Riau, dan kuadran IV terdapat di provinsi Aceh. Kemudian pada analisis Indeks Williamson menunjukkan bahwa rata-rata selama periode delapan tahun sebesar 0,773 dimana termasuk dalam kriteria ketimpangan yang tinggi, ketimpangan yang tinggi disebabkan oleh angka pertumbuhan ekonomi yang rendah serta tidak diimbangi oleh upaya pertumbuhan penduduk yang tinggi. Kesimpulannya bahwa kemajuan suatu daerah di Pulau Sumatera dapat menaikkan tingkat kesejahteraan wilayah di Pulau Sumatera.

Kata Kunci: Tipologi Wilayah, Klasifikasi Klassen, Ketimpangan Wilayah, Pertumbuhan Ekonomi, Kesejahteraan Masyarakat, Jumlah Penduduk.

Pembimbing Skripsi I



Prof. Dr. H. Didik Susetyo, M.Si
NIP: 196007101987031003

Pembimbing Skripsi II



Dr. Imam Asngari, S.E, M. Si
NIP: 1973060720021210

Mengetahui
Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan



Dr. Mukhlis, S.E, M.Si
NIP: 197304062010121001

ABSTRACT

ANALYSIS OF CLASSENT TYPOLOGY AND REGIONAL INEQUALITY IN SUMATERA ISLAND

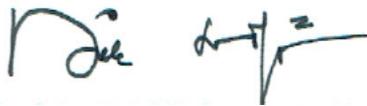
By:

Shania Taradipa, Prof. Dr. H. Didik Susetyo, M.Si, Dr. Imam Asngari, S.E, M. Si

This study aims to identify the typology of classification and regional inequality in the Provinces of Sumatra Island during the 2011-2018 period. The research method used is a qualitative method with descriptive analysis. The data used in this research is secondary data. Sources of data obtained from BPS in Sumatra Island Provinces. The results of the research on the classification of classification where quadrant I is occupied by Jambi province, quadrant II is owned by Bangka Belitung province, quadrant III is in the provinces of North Sumatra, West Sumatra, South Sumatra, Bangka Belitung, Lampung, Riau Islands, and quadrant IV is in Aceh province. Then the Williamson Index analysis shows that the average over a period of eight years is 0.773 which is included in the criteria for high inequality, high inequality is caused by low economic growth rates and is not balanced by high population growth efforts. The conclusion is that the progress of a region on the island of Sumatra can increase the level of regional welfare on the island of Sumatra.

Keywords: Regional Typology, Class Classification, Regional Inequality, Economic Growth, Community Welfare, Total Population.

Advisor I



Prof. Dr. Didik Susetyo, M.Si
NIP: 196007101987031003

Advisor II



Dr. Imam Asngari, S.E, M. Si
NIP: 1973060720021210

Acknowledged by,
Chairman Economic Development Department



Dr. Mukhlis, S.E, M.Si
NIP: 197304062010121001

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Shania Taradipa
NIM : 0102131621184
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 28 Januari 1999
Alamat : Jalan Sutan Syahrir Lrg Kamboja No. 728 RT. 06
RW. 02 Kec. Ilir Timur II Palembang, Sumatera
Selatan.
No. Hp : 081340187875
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Perempuan
Status : Belum Menikah
Kewarganegaraan : Indonesia
E-mail : Shaniatara@gmail.com

Pendidikan Formal

Sekolah Dasar : SD Negeri 57 Palembang
SLTP : SMP Negeri 4 Palembang
SLTA : SMA Negeri 18 Palembang
Strata-1 : Fakultas Ekonomi, Jurusan Ekonomi Pembangunan
Universita Sriwijaya

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF	i
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
2.1 Landasan Teori	15
2.1.1 Produk Domestik Regional Bruto	15
2.1.2 Ketimpangan Wilayah	18
2.1.3 Disparitas antar wilayah	20
2.1.4 Ketimpangan Ekonomi Regional	21
2.1.5 Jumlah Penduduk	22
2.1.6 Pendapatan Perkapita	23
2.1.7 Teori Pertumbuhan Ekonomi	24

2.1.8 Klasifikasi Klassen	27
2.2 Penelitian Terdahulu	34
2.3 Kerangka Pikir	53
BAB III METODE PENELITIAN	55
3.1 Ruang Lingkup Peneitian	55
3.2 Data	55
3.2.1 Jenis Data	36
3.2.2 Sumber Data	36
3.2.3 Data Menurut Waktu	56
3.3 Metode Pengumpulan Data	56
3.4 Teknik Analisis	57
3.4.1 Analisis Laju Pertumbuhan	58
3.4.2 Analisis Tipologi Klassen	58
3.4.3 Analisis Ketimpangan Wilayah	59
3.5 Definisi Operasional Variabel	60
3.5.1 Ketimpangan Wilayah	60
3.5.2 Produk Domestik Regional Bruto	61
3.5.3 Jumlah Penduduk	61
3.5.4 Kalsifikasi Klassen	62
3.5.5 Pertumbuhan Ekonomi	63
BAB IV PEMBAHASAN	64
4.1 Gambaran Umum Variabel Penelitian	64
4.1.1 Laju Pertumbuhan	66
4.1.2 Pendapatan Perkapita	70

4.1.3 Kalsifikasi Klassen	73
4.1.4 Hasil Klasifikasi Tipologi Klassen	75
4.1.5 Jumlah Penduduk	81
4.1.6 Ketimpangan Wilayah	85
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	90
5.1 Kesimpulan	90
5.2 Saran.....	91
DAFTAR PUSTAKA	94
LAMPIRAN.....	97
DAFTAR TABEL	
Tabel Halaman	
Tabel 1 Laju Pertumbuhan Ekonomi	5
Tabel 2 PDRB Perkapita	8
Tabel 3 Jumlah Penduduk	11
Tabel 4.1 Hasil Laju Pertumbuhan	66
Tabel 4.2 Rata-rata PDRB Perkapita	71
Tabel 4.3 Peganbungan Kalsifikasi Tipologi Klassen.....	74
Tabel 4.4 Hasil Kalsifikasi Wilayah	76
Tabel 4.5 Hasil Klasifikasi Tipologi Klassen.....	78
Tabel 4.6 Rata-rata Jumlah Penduduk	81
Tabel 4.7 Nilai Indeks Williamson	86

DAFTAR GRAFIK

Grafik 4.1 Perkembangan Pertumbuhan Penduduk 2011-2018	69
Grafik 4.4 Pola dan Struktur Tipologi Klassen 2011-2018	80
Grafik 4.5 Pertumbuhan Jumlah Penduduk 2011-2018	84
Grafik 4.6 Nilai Indeks Williamson Tahun 2011-2018	88

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran Halaman

Tabel Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2011-2018	97
Tabel Perkembangan Penduduk Tahun 2011-2018	101
Tabel Data Mentah Tahun 2011-2018	105
Tabel Rata-rata Pertumbuhan Ekonomi 2011-2018	107
Tabel Indeks Williamson	108

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan ekonomi adalah suatu proses yang multidimensional yang mencakup perubahan struktur, sikap hidup, serta kelembagaan yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi ketidakmerataan distribusi pendapatan, dan pemberantasan kemiskinan. Pembangunan ekonomi adalah usaha meningkatkan pendapatan perkapita dengan jalan mengolah kekuatan ekonomi potensial menjadi ekonomi riil melalui penggunaan teknologi, penambahan pengetahuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Todaro, 1981).

Peningkatan taraf kehidupan dan kesejahteraan masyarakat diperlukan pertumbuhan ekonomi yang naik dan distribusi pendapatan yang merata. Pertumbuhan ekonomi diukur dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan laju pertumbuhannya. Perbedaan pembangunan ekonomi yang terjadi menyebabkan terjadinya ketimpangan antar wilayah. Ketimpangan merupakan akibat dari kegagalan pembangunan di era globalisasi untuk memenuhi kebutuhan fisik dan psikis warga masyarakat. Ketimpangan pembangunan antar wilayah merupakan aspek yang umum terjadi dalam kegiatan ekonomi suatu daerah.

Hal-hal yang menyebabkan ketimpangan menurut Sjafrizal (2014 : 192) ialah perbedaan potensi daerah yang sangat besar, perbedaan kandungan sumberdaya alam seperti adanya kandungan alam minyak dan gas atau tingkat kesuburan lahan antar daerah satu dengan daerah lainnya, adanya perbedaan

kondisi demografis, ketenagakerjaan, perbedaan kondisi sosial budaya antar wilayah. Disamping itu, kurang lancarnya mobilitas barang dan orang antar daerah juga turut mendorong terjadinya ketimpangan pembangunan antar regional tersebut. Apabila ketimpangan ekonomi antar wilayah cukup besar, maka hal ini dapat membawa dampak yang negatif dari segi ekonomi, sosial dan juga politik. Karena itu, tidaklah mengherankan bilamana pada setiap daerah biasanya terdapat wilayah maju (Development Region) dan wilayah terbelakang (Underdevelopment Region).

Terjadinya ketimpangan antar wilayah ini membawa implikasi terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat antar wilayah dan kemampuan suatu daerah dalam mendorong proses pembangunan juga menjadi berbeda. Dikarenakan adanya perbedaan dari pertumbuhan laju pertumbuhan ekonomi di setiap masing-masing wilayah, maka disini diperlukanlah peran pemerintah daerah untuk meningkatkan pertumbuhan dan mengembangkan daerah yang tertinggal agar pertumbuhan ekonomi dapat merata.

Hal tersebut yang menjadi penyebab timbulnya ketidakselarasan antar wilayah yang telah maju dan wilayah yang tertinggal. Timbulnya hal tersebut mempunyai dampak positif dan negatif, dampak positifnya ialah mendorong wilayah lain untuk berkompetensi dalam meningkatkan perkembangan wilayahnya. Lalu dampak negatifnya ialah dapat menimbulkan tingkat kejahatan yang tinggi pada setiap individu, sebab sedikitnya usaha, kesiapsiagaan dan tidak normalnya rasa simpati dan empati. Maksud dari dikembangkannya potensi suatu daerah ialah untuk meminimalisir ketidakselarasan sebuah wilayah, tujuan ditingkatkannya

agar hasil kerja dari masing-masing daerah yang terbelakang atau tertinggal dapat berkembang (Sjafrizal, 1997 : 262).

Pulau Sumatera merupakan provinsi yang sedang berkembang, dimana pendapatan perkapitanya masih rendah sehingga pemerintah perlu menitik beratkan prioritas pembangunan terhadap pertumbuhan ekonomi. Masalah kesenjangan antar wilayah di Provinsi-provinsi Pulau Sumatera telah menjadi pembahasan utama dalam menetapkan kebijakan pembangunan, perhatian ini timbul karena adanya kecenderungan pada kebijakan yang mengutamakan pertumbuhan ekonomi telah menimbulkan tingginya tingkat kesenjangan yang terjadi, bahkan memungkinkan terjadinya ketidakmerataan pembangunan antar daerah atau wilayah tersebut (Kuncoro, 2009 : 383).

Potensi wilayah di Provinsi-provinsi Pulau Sumatera menempatkan provinsi-provinsi ini sebagai provinsi yang memiliki laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi, akan tetapi tingginya ketimpangan pendapatan dan jumlah penduduk di provinsi-provinsi tersebut masih menunjukkan pembangunan ekonomi yang belum tercapai dengan baik (BPS, 2012). Kondisi perekonomian suatu daerah dapat dilihat dari beberapa indikator, diantaranya adalah PDRB, PDRB perkapita dan jumlah penduduk. PDRB sering dipakai sebagai indikator kemakmuran suatu daerah terkait dengan masing-masing suatu wilayah. Ketidakmerataan kondisi ekonomi di Provinsi-provinsi Pulau Sumatera tahun 2011-2018 dapat ditunjukkan dari perbedaan PDRB sektor pada masing-masing wilayah.

Pertumbuhan ekonomi di Provinsi-provinsi Pulau Sumatera sangat berfluktuasi selama periode 2011-2018, dimana Pulau Sumatera memiliki sepuluh

Provinsi dengan tingkat keragaman pertumbuhan ekonomi yang berbeda-beda, hal ini dikarenakan setiap provinsi memiliki perbedaan potensi baik dari sumber daya alam maupun sumber daya manusia dengan kualitas teknologi yang dimiliki oleh masing-masing provinsi di Pulau Sumatera. Pulau Sumatera terdiri dari sepuluh provinsi yaitu: Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, dan ditambah dua provinsi pemekaran yaitu Kepulauan Riau dan Kepulauan Bangka Belitung. Masing-masing di Provinsi Pulau Sumatera memiliki potensi sumber daya alam yang menjadi daya tarik tersendiri bagi masing-masing wilayah tersebut. Perbedaan inilah yang menimbulkan tingkat pertumbuhan pembangunan antar daerah pada masing-masing wilayah di Provinsi-provinsi Pulau Sumatera menjadi berbeda (Umiyati, 2012 : 43).

Pada Tabel 1.1 merupakan data dari laju pertumbuhan ekonomi di Provinsi-provinsi Pulau Sumatera Tahun 2011-2018 beserta rata-rata dari sepuluh Provinsi di Pulau Sumatera yang memperlihatkan dan menjelaskan bagaimana kenaikan angka pertumbuhan ekonomi disetiap tahunnya selama periode delapan tahun. Pada Tabel 1.1 angka pertumbuhan ekonomi telah diolah sehingga dalam bentuk persen atas dasar harga konstan, yang sudah ada di website Badan Pusat Statistik (BPS). Berikut terdapat sepuluh Provinsi yang ada di Provinsi-provinsi Pulau Sumatera Tahun 2011-2018 mengalami perubahan dalam kenaikan atau penurunan angka pada tingkat pertumbuhan di setiap tahunnya, salah satunya dikarenakan adanya kenaikan jumlah penduduk pada setiap tahun dan pendapatan yang dikeluarkan untuk memenuhi hidup juga menjadi meningkat.

**Tabel 1.1. Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi-provinsi Pulau Sumatera
Atas Dasar Harga Konstan Periode 2011-2018 (persen)**

Provinsi	Pertumbuhan PDRB (Pertumbuhan Ekonomi) (%)							
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Aceh	3,28	3,85	2,61	1,55	-0,73	3,29	4,18	4,61
Sumatera Utara	6,66	6,45	6,07	5,23	5,1	5,18	5,12	5,18
Sumatera Barat	6,34	6,31	6,08	5,88	5,53	5,27	5,3	5,16
Riau	5,57	3,76	2,48	2,71	0,22	2,18	2,66	2,37
Jambi	7,86	7,03	6,84	7,36	4,21	4,37	4,6	4,47
Sumatera Selatan	6,36	6,83	5,31	4,79	4,42	5,04	5,51	6,04
Bengkulu	6,85	6,83	6,07	5,48	5,13	5,28	4,98	4,99
Lampung	6,56	6,44	5,77	5,08	5,13	5,14	5,16	5,52
Kepulauan Riau	6,56	7,63	7,21	6,6	6,02	4,98	1,98	4,58
Bangka Belitung	6,9	5,5	5,2	4,67	4,08	4,1	4,47	4,46
SUMATERA	6,29	6,06	5,36	4,94	3,91	4,48	4,4	4,74

Sumber: BPS Tahun 2020, diolah.

Dapat di lihat pada Tabel 1.1 di atas, merupakan perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan di Provinsi-provinsi Pulau Sumatera pada Tahun 2011-2018 menunjukkan beragamnya naik dan turunnya angka pertumbuhan pada setiap tahunnya. Provinsi Jambi mencatat nilai PDRB tertinggi yaitu pada tahun 2011, yaitu sebesar 7,86 persen, sedangkan pada tahun 2018 mengalami penurunan yakni sebesar 4,47 persen. Sebaliknya terdapat Provinsi yang nilai pertumbuhan ekonominya rendah yaitu terdapat di Provinsi Riau sebesar 2,34 persen pada tahun 2018.

Lalu, terdapat rata-rata laju pertumbuhan ekonomi yang paling tinggi pertahunnya diantara sembilan provinsi lainnya, yaitu terdapat pada Provinsi Sumatera Selatan dengan rata-rata sebesar 6,04 persen pada tahun 2018, sementara yang paling rendah rata-rata ialah di provinsi Riau, sebesar 2,37. Dari sepuluh provinsi di Pulau Sumatera dari tahun 2011-2018 memiliki rata-rata sumatera yakni sebesar 4,74 di tahun 2018.

Jadi penyebab dari naik dan turunnya angka pertumbuhan ekonomi ialah dipengaruhi oleh tingkat PDRB sektornya yang lebih banyak mendominasi sektor pertanian, kehutanan, perikanan dan kehutanan. Sementara juga terdapat sektor yang mendominasi industri pengolahan batubara, pertambangan dan penggalian. Berikut pertumbuhan ekonomi di sepuluh provinsi Pulau Sumatera selama periode delapan tahun memiliki karakteristik sumber daya yang berbeda-beda. Pertama, pada Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam di dominasi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 26.515.484,4 pada tahun 2018, dengan total PDRB sebesar 126.824.491,4 dan PDRB non migas sebesar 120.848.725,8.

Kedua, Provinsi Sumatera Utara didominasi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 127.202,65 pada tahun 2018, dengan total PDRB sebesar 512.765,63 dan PDRB non migas sebesar 512.203,85. Ketiga, pada Provinsi Sumatera Barat, juga termasuk dalam sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 36.648.788,68 pada tahun 2018, dengan total PDRB sebesar 164.033.655,47. Keempat, Provinsi Riau didominasi sektor industri pengolahan batu bara sebesar 144.761.098,79 pada tahun 2018, dengan total PDRB sebesar 482.158.384,87 dan PDRB non migas sebesar 404.162.605,70. Kelima, pada

Provinsi Jambi berdominasi di sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 37.979,41 pada tahun 2018, dengan total PDRB sebesar 142.968,30.

Keenam, Provinsi Sumatera Selatan berpotensi di sektor pertambangan dan penggalian (pertambangan minyak, gas, panas bumi dan pertambangan batu bara) sebesar 66.000,21 pada tahun 2018 dengan total PDRB sebesar 298.569,69. Ketujuh, pada Provinsi Bengkulu yang didominasi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 12.309.491,83 pada tahun 2018, dengan total PDRB sebesar 44.161,19 dan PDRB non migas sebesar 30.295.054,20. Kedelapan, pada Provinsi Lampung yang didominasi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 66.905.849,09 dengan PDRB sebesar 232.207,677,93.

Sembilan, pada Provinsi Kepulauan Riau memiliki sektor unggulan di bidang industri pengolahan sebesar 65.019.396,52 pada tahun 2018 dengan total PDRB sebesar 173.684.304,01 dan PDRB non migas sebesar 150.991.726,16. Yang terakhir, di Provinsi Bangka Belitung yang juga termasuk pada sektor di bidang industri pengolahan sebesar 11.791.567,23 pada tahun 2018 dengan total PDRB sebesar 52.215. 418,25 dan PDRB non migas sebesar 51.872.162,87.

Menurut (Arsyad, 1999 : 148) keberhasilan pembangunan ekonomi suatu daerah dapat dilihat dari laju pertumbuhan ekonominya. Oleh sebab itu, setiap daerah selalu menetapkan target laju pertumbuhan yang tinggi didalam perencanaan dan tujuan pembangunan ekonomi daerahnya. Suatu ekonomi dikatakan mengalami pertumbuhan dan tingkat pendapatan perkapitanya yang berkembang, apabila tingkat kegiatan ekonominya lebih tinggi dari pada apa yang dicapai pada masa sebelumnya. Secara teoritis dikatakan bahwa semakin tinggi tingkat pendapatan

suatu masyarakat, maka semakin baik tingkat kesejahteraannya. Keadaan ekonomi di setiap Provinsi-provinsi Pulau Sumatera sangat beragam, ada yang baru mulai berkembang dari titik awal dan juga ada yang sudah lebih lama berkembang.

Tujuan utama dari pertumbuhan ekonomi di negara-negara berkembang adalah peningkatan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakatnya. Di negara maju, yang lebih dipentingkan oleh pemerintah pusat adalah masalah pemerataan karena tingkat pendapatan perkapita yang tinggi. Berbeda dengan di negara berkembang karena pendapatan perkapitanya masih rendah, maka pemerintah lebih memprioritaskan pertumbuhan ekonomi. Meskipun di negara-negara berkembang tujuan pertumbuhan ekonomi lebih utama, namun masalah distribusi pendapatan tidak boleh ditinggalkan (Todaro, 2000 : 12). Berikut pada Tabel 1.2 merupakan perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Perkapita (PDRB Perkapita) Atas Dasar harga konstan.

Tabel 1.2. PDRB Perkapita di Provinsi-Provinsi Pulau Sumatera, Tahun 2011-2018

Provinsi	Produk Domestik Regional Bruto Perkapita [Ribuan Rupiah] Harga Konstan 2010							
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Aceh	22.704,80	23.099,13	23.228,59	23.129,04	22.524,31	22.835,29	23.362,90	24.013,81
Sumatera Utara	26.711,24	28.036,88	29.339,21	30.477,07	31.637,41	32.885,09	34.183,58	35.570,71
Sumatera Barat	22.638,75	23.744,01	24.857,64	25.982,83	27.080,76	28.164,93	29.312,17	30.477,76
Riau	71.637,89	72.396,34	72.297,05	72.390,88	70.769,78	70.569,36	70.740,43	70.750,52
Jambi	30.856,66	32.417,72	34.012,10	35.878,09	36.753,52	37.728,80	38.833,87	40.044,09
Sumatera Selatan	27.157,98	28.577,89	29.656,76	30.636,27	31.549,30	32.699,50	34.059,71	35.670,04
Bengkulu	17.282,27	18.143,51	18.919,30	19.626,72	20.302,48	21.039,84	21.751,64	22.498,43
Lampung	20.739,31	21.794,83	22.770,68	23.647,27	24.581,78	25.568,57	26.614,88	27.741,25
Kepulauan Riau	30.212,18	31.172,42	32.081,30	32.859,64	33.480,38	34.132,87	34.933,52	35.767,10
Bangka Belitung	68.024,21	70.930	73.743,33	76.313,81	78.625,43	80.295,60	79.743,68	81.293,05
SUMATERA	33796,529	35031,273	36805,467	37094,162	37730,515	38591,99	39353,638	40382,676

Sumber: Data BPS Tahun 2020, diolah.

Dari tabulasi di atas, dapat di lihat bahwa PDRB perkapita pada masing-masing Provinsi di Pulau Sumatera selama kurun waktu delapan tahun selalu mengalami kenaikan, kecuali di Provinsi Riau yang mengalami penurunan dan tidak stabilnya kenaikan angka dari tahun 2013 sampai tahun 2015 yakni sebesar 22.524,31 ribu rupiah, dan mengalami peningkatan lagi di tahun 2018 yang sebesar 24.013,81 ribu rupiah. Lalu, pada Provinsi Bengkulu termasuk dalam kategori Provinsi yang paling kecil dan tertinggal dibandingkan dengan sembilan Provinsi lainnya yaitu sebesar 22,498,43 ribu rupiah di tahun 2018.

Sebaliknya, diantara sepuluh Provinsi tersebut terdapat dua Provinsi yakni Provinsi Bangka Belitung dan Provinsi Riau yang setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan di tahun 2018 sebesar 81.293,05 ribu rupiah. Sementara, pada Provinsi Riau adalah sebesar 70.750,52 ribu rupiah. Selisih antara PDRB Perkapita tertinggi dengan PDRB Perkapita terendah (Range PDRB Perkapita) Provinsi-provinsi yang terjadi di Pulau Sumatera sangatlah jauh. Range PDRB Perkapita tahun 2011 di Provinsi Riau sangat tinggi yakni sebesar 71.637,89 ribu rupiah dan range PDRB tahun 2011 di Provinsi Bangka Belitung yaitu sebesar 68.024,21 rupiah.

Fenomena ini menunjukkan bahwa pendapatan perkapita antar wilayah di Provinsi-provinsi Pulau Sumatera sangat rendah, sehingga dapat mendorong terjadinya ketimpangan di wilayah Pulau Sumatera. Penyebab tingkat pendapatan tidak stabil atau bahkan menurun biasanya berupa perbedaan kandungan sumber daya alam yang kurang efektif atau kurang merata, dengan adanya perbedaan tersebut membuat kegiatan produksi daerah yang memiliki sumber daya alam juga

ikut menurun, dan juga dikarenakan banyaknya masyarakat yang miskin atau yang kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, oleh karena itu kurangnya biaya atau kurang sejahteranya masyarakat sangat mempengaruhi bagaimana laju pertumbuhan dan tingkat pendapatan pada masing-masing wilayah yang terdapat di Provinsi-provinsi Pulau Sumatera. Potensi wilayah di provinsi Pulau Sumatera menempatkan sebagai provinsi kaya yang memiliki laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi, akan tetapi tingginya ketimpangan pendapatan dan pertumbuhan jumlah penduduk di Provinsi tersebut masih menunjukkan pembangunan ekonomi yang belum tercapai dengan baik (BPS, 2012).

Pemerintah menyadari bahwa masalah kesenjangan yang terjadi baik antar wilayah maupun antar daerah, dalam hal ini Provinsi-provinsi di Pulau Sumatera sangat penting untuk ditanggulangi. Karena masalah ini selain menimbulkan permasalahan ekonomi dan sosial, juga dapat menyebabkan ketidakstabilan politik dan disintegrasi. Dimana kesenjangan antar wilayah masih merupakan kondisi yang nyata yang sampai saat ini masih dirasakan oleh masyarakat. Apabila, jumlah penduduk meningkat (tinggi) sedangkan pertumbuhannya rendah, maka akan terjadi masalah dan menyebabkan meningkatnya ketimpangan di Provinsi-provinsi Pulau Sumatera.

Berikut pada Tabel 1.3 memperlihatkan bagaimana perkembangan penduduk dan total Sumatera di Provinsi-provinsi Pulau Sumatera Tahun 2011-2018 atas dasar harga konstan (Ribu Jiwa) yang diambil melalui website Badan Pusat Statistik (BPS). Bertambahnya pertumbuhan penduduk ialah adanya kelahiran dan imigrasi yang mengalami peningkatan penduduk di setiap tahunnya.

**Tabel 1.3. Jumlah Penduduk di Provinsi-provinsi Pulau Sumatera
Tahun 2011-2018**

Provinsi	Jumlah Penduduk di Provinsi-provinsi Pulau Sumatera Tahun 2011-2018 (Ribuan Jiwa)							
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Aceh	4.619,00	4.715,10	4.811,10	4.906,80	5.002	5.096,20	5.189,50	5.281,30
Sumatera Utara	13.220,90	13.408,20	13.590,30	13.766,90	1.937,80	14.102,90	14.262,10	14.415,40
Sumatera Barat	4.933,10	5.000,20	5.066,50	5.131,90	5.196,30	5.259,50	5.321,50	5.321,50
Riau	5.726,20	5.879,10	6.033,30	6.188,40	6.344,40	6.501	6.657,90	6.814,90
Jambi	3.167,60	3.227,10	3.286,10	3.344,40	3.402,10	3.458,90	3.515	3.570,30
Sumatera Selatan	7.598,50	7.714,30	7.828,70	7.945,50	8.052,32	8.160,90	8.266,98	8.370,32
Bengkulu	1.753,00	1.783,70	1.814,40	1.844,80	1.874,90	1.904,80	1.934,30	1.963,30
Lampung	7.735,90	7.835,30	7.932,10	8.026,20	8.117,30	8.205,10	8.289,60	8.370,50
Kepulauan Riau	1.748,80	1.805,10	1.861,40	1.917,42	1.973,04	2.028,17	2.082,69	2.136,52
Bangka Belitung	1.258,20	1.286,60	1.315,10	1.343,90	1.372,80	1.401,80	1.430,90	1.459,90
SUMATERA	5.176,12	5.265,47	5.353,90	5.441,62	4.430,10	5.611,93	5.695,05	5.770,39

Sumber: BPS Tahun 2020, diolah.

Pada Tabel 1.3 di atas merupakan pertumbuhan jumlah penduduk yang sangat berfluktuasi pada setiap tahunnya selama periode delapan tahun. Pada posisi pertama, di Provinsi Sumatera Utara merupakan salah satu Provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak yaitu tercatat dalam tahun 2018 yang berjumlah 14.415,40 ribu jiwa. Lalu, jumlah penduduk kedua terbanyak ialah Provinsi Lampung sebanyak 8.370,50 ribu jiwa. yang ketiga terdapat di Provinsi Sumatera Selatan yang jumlahnya tidak jauh beda dari provinsi sebelumnya, yakni sebanyak 8.370,32 ribu jiwa. Dan yang keempat terdapat di Provinsi Riau, sebanyak 6.814,90 ribu jiwa.

Sebaliknya, terdapat juga tiga Provinsi di Pulau Sumatera yang angka jumlah penduduknya paling rendah diantara sembilan Provinsi lainnya, yaitu pertama terdapat di Provinsi Bangka Belitung yakni sebanyak 1.459,90 ribu jiwa pada tahun 2018, kedua terdapat di Provinsi Bengkulu yakni sebanyak 1.963.30 ribu jiwa di tahun 2018, dan yang ketiga terdapat di Provinsi Kepulauan Riau sebanyak 2.136,52 ribu jiwa.

Provinsi-provinsi di Pulau Sumatera di tahun 2018 dengan capaian tertinggi dalam perkembangan pembangunan manusia berdasarkan dari urutan tertinggi adalah Provinsi Sumatera Utara, Lampung, Sumatera Selatan, diikuti Riau, Sumatera Barat, Aceh dan Jambi. Sebaliknya, pada urutan terendah ditepati pada Provinsi Bangka Belitung, Bengkulu dan Kepulauan Riau.

Berdasarkan pada teori-teori dan juga penjelasan yang telah diuraikan diatas, masih terdapat banyak lagi teori-teori yang bisa dipelajari, dipahami, dan diamati yang dapat dilakukan dalam mengatasi ketimpangan wilayah di Provinsi-provinsi Pulau Sumatera periode 2011-2018, misalnya dengan melakukan penyebaran persebaran prasarana pembangunan, mendorong masyarakat untuk melakukan transmigrasi dan migrasi dengan demikian pola persebaran penduduk akan merata, melakukan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan dan melakukan kebijakan otonomi daerah agar tiap daerah dapat menentukan kebijakannya sendiri. Maka dari itu penulis akan melakukan penelitian dan ingin menuangkannya dalam bentuk karya tulis ilmiah dengan judul *“Analisis Tipologi Klassen dan Ketimpangan Wilayah di Pulau Sumatera”*.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah di jabarkan di atas, permasalahan dalam penelitian ini dapat di rumuskan yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pertumbuhan ekonomi di provinsi-provinsi Pulau Sumatera?
2. Bagaimana pola pertumbuhan ekonomi serta klasifikasi di provinsi-provinsi Pulau Sumatera menurut Tipologi Klassen?
3. Berapa besar tingkat ketimpangan regional antar wilayah di provinsi-provinsi Pulau Sumatera berdasarkan Indeks Williamson?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada permasalahan di atas, dapat di jelaskan tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Guna mengetahui besarnya tingkat ketimpangan pembangunan berdasarkan pengelompokan wilayah tipologi klassen di Provinsi-provinsi Pulau Sumatera.

1.4 Manfaat Penelitian

Maka di bawah ini terdapat beberapa manfaat penelitian yang dapat di ambil dan dapat di jadikan referensi bagi penelitian selanjutnya, yaitu sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Pengkajian mengenai hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk perkembangan ilmu ekonomi, dan kita dapat mengetahui dan mengkaji analisis faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya ketimpangan wilayah secara empiris dan teoritis. Dan diharapkan menjadi referensi bagi peneliti lain dan sekaligus dapat

menambah ilmu pengetahuan mengenai klasifikasi tipologi kawasan dan ketimpangan pembangunan antar wilayah di Provinsi-provinsi Pulau Sumatera.

1.4.2 Manfaat Praktis

Praktisnya, pengkajian diharapkan mampu memberikan informasi yang berguna untuk mencari solusi untuk mengatasi ketidakmerataan pembangunan yang menyebabkan terjadinya ketimpangan wilayah dan sekaligus dapat bertambahnya pengetahuan dan kegunaan sumber referensi. Tujuan kepentingannya ialah untuk mencari fakta dan menambah ilmu dan cara menyelesaikan sebuah kasus di masa depan. Untuk peneliti, dapat menjadi penambah wawasan mengenai analisa klasifikasi kawasan dan ketimpangan pembangunan antar wilayah yang terdapat di Provinsi-provinsi Pulau Sumatera.

DAFTAR PUSTAKA

- Ai, T. (2015). Fuzzy-Klassen Model for Development Disparities Analysis based on Gross Regional Domestic Product Sector of a Region. *International Journal of Computer Applications*.
- Arsyad, L. (1999). *Ekonomi Pembayaran. Bagian Penerbitan. STIE YKPN*. Yogyakarta.
- Bashir, A. (2018). The Relationship Between Economic Growth, Human Capital, and Agriculture Sector: Empirical Evidence From Indonesia. *International Journal of Food and Agricultural Economics*.
- Bashir, B. B., & Abdul. (2017). Analisis Tipologi dan Hubungan Antara Indeks Pembangunan Manusia dan Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera Selatan. *Ekonomi Pembangunan*.
- Handayani, T. (2019). Pengaruh Belanja Modal, Infrastruktur dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Produk Domestik Regional Bruto di Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*.
- Hariyanto, S. (2018). Pengaruh Belanja Modal Dan Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Sumatera Selatan.
- Iswanto, D. (2015). Ketimpangan Pendapatan Antar Kabupaten/Kota dan Pertumbuhan Ekonomi di Propinsi Jawa Timur .
- Kuncoro, M. (2003). *Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah, dan Kebijakan, Edisi Ketiga*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Kuncoro, M. (2009). *Ekonomika Indonesia. Yogyakarta: UPP STIM YKPN*.
- Kuncoro, M. (2013). *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi. Edisi Keempat*. Jakarta: Erlangga.
- Mukhlis, M. (2020). Agglomeration of Manufacturing Industrial, Economic Growth, And Interregional Inequality in South Sumatra, Indonesia. *International Journal of Economics and Financial Issues*.
- Norma Rita Sari, A. P. (2013). Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan Antar Provinsi di Indonesia Tahun 2004-2010. *Diponegoro Journal of Economics*.
- Nurhayani, R. (2014). Studi Komperatif Ketimpangan Wilayah Antara Kawasan Barat Indonesia dan Kawasan Timur Indonesia. *Jurnal Manajemen Terapan dan Keuangan*.
- Nya. (2014). Regional Income Disparities in Indonesia: Measurements, Convergence Process, and Decentralizations.

- Pascadinata, R. (2009). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Selatan Periode 2010 – 2016.
- Pratama, A. (2018). Pengaruh Kemajuan Daerah Terhadap Ketimpangan Pembangunan Ekonomi Antar Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.
- Pratama, W. R. (2014). Kesenjangan Antara Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Selatan.
- Refqi, M. (2019). Determinants of Regional Disparities in Indonesia : Lessons from Provincial Level. *Economics and Development Studies Department*.
- S, U. A. (2017). Ketimpangan Pendapatan Perkapita di Pulau Sumatera Tahun 2003-2013. *JOMFekom*.
- Sari, N. R. (2013). Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan Antar Provinsi Di Indonesia Tahun 2004-2010.
- Sebayang, P. S. (2011). Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Antar Propinsi Sumatera Tahun 2011-2015.
- Simbolon, T. R. (2017). Analisa Keterkaitan Ketimpangan Pembangunan Antar Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Wilayah Sumatera.
- Sjafrizal. (1997). *Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Regional Wilayah Indonesia Bagian Barat*. LP3ES Jakarta.
- Sjafrizal. (2014). *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi*. LP3ES Jakarta.
- Sodik, J. (2006). Pertumbuhan Ekonomi Regional Studi Kasus Analisis Konvergensi Antar Propinsi di Indonesia. *Ekonomi Pembangunan*.
- Subardin, M. (2006). Dampak Perkebunan Besar Kelapa Sawit terhadap Kesejahteraan Rakyat. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*.
- Sukirno. (2012). *Makro ekonomi Teori Pengantar Edisi Ketiga*. . Jakarta: Rajawali Pers.
- Sukirno, S. (2000). *Makroekonomi Modern: Perkembangan Pemikiran Dari Klasik Hingga Keynesian Baru*. . Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Susetyo, D. (2018). Impact of Capital Expenditure and Public Utility Customers to Economic Development of District-City in Sumatra-Indonesia. *International Journal of Economics and Financial Issues*.
- Syahrial. (2014). Analisis Klasifikasi Daerah dan Disparitas Pembangunan Ekonomi Antar Propinsi di Pulau Sumatera.

- Tamboen, F. M. (1989). The impact of transport on regional development in Indonesia (a case study of province of North Sumatera). *PQDT - UK & Ireland*.
- Todaro, M. (2000). *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga. Edisi Ketujuh. Alih Bahasa: Haris Munandar*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Umiyati, E. (2013). Analisa Pertumbuhan Ekonomi Dan Ketimpangan Pembangunan Antar Wilayah Di Pulau Sumatera. *Jurnal Paradigma Ekonomika*.
- Vaulina, S. (2015). Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Wilayah di Provinsi Riau. *Dinamika Pertanian*.
- Widodo, T. (2006). *Perencanaan Pembangunan Aplikasi Komputer (Era Otonomi Daerah) UUP STIM YKPN*. Yogyakarta.
- Yeniwati, Y. (2013). Ketimpangan Ekonomi Antar Provinsi Di Sumatera. *Jurnal Kajian Ekonomi*.
- Yusuf, M. (2013). The Gap Analysis of Development Between Regency or City in the Province of North Sumatra for the Period 2004-2008. *QE Journal*.